



KEARIFAN SOSIOKULTURAL: HULU MODERASI BERAGAMA PESANTREN BERSAMA MASYARAKAT ADAT DI KALIMANTAN TIMUR

Mubarak Mubarak¹, Anida Yuspa², Nurdin Nurdin³

¹Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Kalimantan Timur, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah Martapura, Indonesia

³Khartoum University, Sudan

e-mail: hajimubarak82@gmail.com¹, yusfa345@gmail.com², buya.cece@gmail.com³

Abstract

This research explores the socio-cultural wisdom of Islamic boarding schools (pesantren), focusing on PPKP Ribathul Khail in Kutai Kartanegara, East Kalimantan. Utilizing a qualitative approach and Social Anthropology of Religion, the study aims to comprehend the religious patterns of the community and apply socio-cultural wisdom in the context of the pesantren alongside the indigenous community. The research methodology involves in-depth interviews with the leaders of PPKP Ribathul Khail Tenggarong, and data analysis utilizes triangulation techniques through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the socio-cultural wisdom of PPKP Ribathul Khail reflects a prudent attitude based on knowledge and experiences in social life with the community. The pesantren strikes a balance between Islamic teachings, traditional customs, and societal norms. The cultivation of students' mentality through methods of self-control, seeking assistance, and engaging in practices accompanying obligatory worship supports this wisdom. Additionally, the socio-cultural wisdom of the pesantren draws from an understanding of community traditions, assessing that beneficial traditions with no negative impact can be accommodated within Islamic teachings. This research underscores the significance of pesantren as an educational institution bridging religion, tradition, and community social life.

Keywords: *Sociocultural Wisdom, Religious Moderation, Kutai Kraton*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kearifan sosiokultural pesantren, dengan fokus pada PPKP Ribathul Khail di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menggunakan pendekatan kualitatif dan Antropologi Sosial Agama, penelitian ini bertujuan untuk memahami corak keagamaan masyarakat dan menerapkan kearifan sosiokultural dalam konteks pesantren bersama masyarakat adat. Metode penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan pimpinan PPKP Ribathul Khail Tenggarong, dan analisis data menggunakan triangulasi teknik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan sosiokultural PPKP Ribathul Khail mencerminkan sikap kebijaksanaan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sosial bersama masyarakat. Pesantren ini menemukan keseimbangan antara ajaran Islam, adat tradisi, dan norma-norma sosial. Pembinaan mentalitas santri melalui metode pengendalian diri, memohon pertolongan, dan amalan-amalan yang mengiringi ibadah wajib menjadi pendukung pandangan kearifan ini. Kearifan sosiokultural pesantren ini juga bersumber dari pemahaman terhadap tradisi masyarakat, dengan penilaian bahwa tradisi yang baik dan tidak berdampak negatif dapat diakomodasi dalam ajaran Islam. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menjembatani antara agama, tradisi, dan kehidupan sosial masyarakat.

Kata Kunci: *Kearifan Sosiokultural, Moderasi Beragama, Kutai Kraton*

Pendahuluan

Pesantren secara umum memiliki prinsip beragama yang erat kaitannya dengan masyarakat. Pesantren menempati ruang hidup yang menampung berbagai pengalamannya bersama-sama masyarakat. Bentuk kesadaran kalangan pesantren terhadap masyarakatnya ditopang pula oleh kemampuannya untuk bertindak dengan baik di tengah-tengah masyarakat berdasarkan pengalaman, pemahaman, pengetahuan, serta wawasannya.¹ Dalam konteks bermasyarakat inilah maka kedudukan pesantren sebagai sumberdaya sosial, turut menempatkan mereka dalam peranan pemelihara budaya (*cultural maintenance*) di masyarakat. Hal ini pernah dilakukan di masa lalu oleh sembilan orang Wali (Walisongo) di tanah Jawa yang dalam peranan kemasyarakatan itu melahirkan kesinambungan ideologi dan historis antara pesantren dan masyarakatnya, yang sekaligus menempatkannya sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) di masyarakat melalui pendekatan kultural. Oleh karenanya, pesantren dituntut agar mampu melanggengkan nalar teologis dan budayanya di tengah-tengah masyarakat bersama berbagai fenomena multikulturalnya, serta menempatkan diri bersama masyarakatnya dalam situasi hidup berdampingan dengan penuh kearifan. Peranan pesantren di tengah masyarakat itulah yang dianggap mampu mempertahankan budaya masyarakat lokal dan menempatkan diri bersamanya dalam situasi hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*).²

Keberadaan pesantren saat ini telah dilegitimasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.³ Kehadiran undang-undang ini disambut gembira oleh para pengelola pesantren sebab pemerintah dianggap telah mengakomodir pesantren secara penuh dalam sistem pendidikan

¹ Isnaini Nuruddin Akbar, "Normalization of Gender Bias Regulations in Pondok Pesantren: Normalisasi Regulasi Bias Gender di Pondok Pesantren," *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 23, no. 1 (t.t.): 109–26; Aqimi Dinana dan Subiyantoro Subiyantoro, "Peran Pengasuh dalam Manajemen Perubahan pada Lingkungan Organisasi Pondok Pesantren Tegalsari di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan* 9, no. 2 (2021): 56–66; Akramun Nisa, "PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA DAKWAH PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA," *Ash-Shababab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 7, no. 1 (2021): 31–42.

² Abdurrahman Mas'ud, "Prolog: Memahami Agama Damai Dunia Pesantren" dalam Badrus Sholeh, ed., *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), p. xxii–xxiii.

³ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren" (2019).

nasional dengan kekhususan penyelenggaraan pendidikannya.⁴ Undang-Undang Pesantren pada Pasal 4 menyatakan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Terkait fungsi pendidikannya, pesantren melaksanakan kegiatan pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional menurut kekhasan, tradisi dan kurikulum masing-masing guna membentuk santri yang unggul dalam menghadapi perkembangan zaman.⁵ Sedangkan mengenai fungsi dakwahnya, pesantren melaksanakannya untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil 'alamin* dengan upaya mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran, mengajarkan pemahaman dan keteladanan dalam pengamalan nilai-nilai keislaman yang rendah hati, toleran, berkeseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dengan tetap memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat, menjaga kerukunan hidup umat beragama, serta praktik keberagamaan yang moderat.⁶ Adapun berkaitan fungsi pemberdayaan masyarakat, orientasi pesantren ialah meningkatkan kesejahteraan pesantren dan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pendidikannya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.⁷

Mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* menjadi alasan moderasi beragama dalam konteks pendidikan Islam di pesantren. Moderasi beragama dilatarbelakangi oleh fenomena multikultural di Indonesia yang berkaitan dengan masalah identitas, kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan, tradisi, pola-pola kelakuan, sampai dalam hal kemajuan tertentu dari kelompok-kelompok di masyarakat.⁸ Moderasi beragama dalam lembaga pendidikan Islam belakangan ini menjadi isu penting yang dihadirkan oleh beberapa kalangan guna meneguhkan citra lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren.⁹ Pemikiran ini antara lain menuntut agar pesantren menjadi laboratorium moderasi beragama yang dibangun atas dasar filosofis universal dalam hubungan sosial kemanusiaan, di mana lembaga pendidikan Islam sepantasnya menjadi sarana yang

⁴Cahya Mulyana, "UU Pesantren Akomodasi Usulan Ormas," *Media Indonesia*, diakses 26 Juni 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/261558-uu-pesantren-akomodasi-usulan-ormas>.

⁵Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Pesantren.

⁶Pasal 37, 38, dan 40 Undang-Undang Pesantren.

⁷Pasal 43 dan 44 Undang-Undang Pesantren.

⁸Musthofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan Di Tengah Arus Globalisasi*, Cet. 2. (Yogyakarta: Teras, 2010), p. 41-42.

⁹Ahmad Mukafi Niam, "Pesantren, Hulu Moderasi Berislam di Indonesia," *NU Online*, diakses 22 Juni 2022, <https://www.nu.or.id/post/read/123958/pesantren--hulu-moderasi-berislam-di-indonesia>.

tepat guna untuk menyebarkan sensitifitas peserta didik pada ragam perbedaan, menjadi lahan penyemaian gagasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai multikulturalisme, membawa pesan-pesan agama dengan lebih damai, serta menebarkan cinta kasih pada kemanusiaan, yang dapat mewujud dalam kurikulum yang berorientasi moderasi beragama.¹⁰ Instalasi Islam moderat di lembaga pendidikan Islam dapat dilakukan melalui rumusan tujuan pendidikannya, filterisasi materi ajar dalam konten kurikulum, serta internalisasi nilai-nilai Islam moderat dalam mendesain kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*).¹¹ Moderasi pendidikan Islam itu diimplementasikan dalam nilai-nilai Islam moderat yang *rahmatan li al-'âlamîn*, yaitu: *tawâsuth* (sikap tengah-tengah), *tawâzun* (sikap seimbang), *i'tidâl* (sikap berkeadilan), *tasâmuh* (sikap toleransi), *musâwah* (sikap egaliter/sederajat), *yyûrâ* (sikap bertukar pendapat), *ishlah* (sikap berdamai), *awlâwiyah* (sikap memprioritaskan perkara yang lebih penting) *tathanwur wa ibtikâr* (sikap dinamis dan inovatif) dan *tahadhdhur* (sikap berkeadaban).¹²

Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PPKP) Ribathul Khail adalah salah satu pesantren yang melaksanakan kegiatan pendidikan Islam di tengah-tengah masyarakat adat Etnis Kutai Subkultur Kutai Kraton di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Eksotisme budaya masyarakat adat Kutai Kraton dikenali dengan warisan ritual dan tradisi adat dalam akulturasi budaya dan agama (Animisme, Hindu dan Islam). Salah satunya ialah rangkaian Upacara Adat *Érau* Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura di Tenggarong. Upacara adat *Érau* Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura selain mengandung makna sakral dan ritual, juga merupakan hiburan bagi rakyat yang biasanya dilaksanakan pada bulan-bulan mendekati hari jadi Kota Tenggarong (29 September 1782) selama tujuh hari berturut-turut. Upacara *Érau* pertama kali dilakukan pada acara *Tijak Tanah* dan *Mandi ke Tepian* Aji Batara Agung Dewa Sakti pada usia lima tahun dan setelah ia diangkat sebagai Raja Kutai Kartanegara

¹⁰Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam*, No. 1, Vol. 12 (2019): 324–48.

¹¹Toto Suharto, "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia," *At-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, No. 01, Vol. 17 (2017): 155–78.

¹²Hamdi Abdul Karim, "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatan lil 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam," *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, No. 01, Vol. 4 (2019): 1–20.

yang pertama (1300-1325 M). Upacara *Érau* juga diadakan ketika pergantian atau penobatan Raja-Raja Kutai Kartanegara.¹³

Keberadaan PPKP Ribhatul Khail di tengah masyarakat adat Kutai Kraton dalam dimensi kepercayaan, ragam ritual, dan ekspresi kebudayaannya, dihadapkan dengan pilihan agar mampu menyemai nilai-nilai keberagaman yang moderat, bertoleransi dalam bingkai kemajemukan, serta menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pendidikan Islam yang dilakukannya. Melalui tulisan ini ulasan tentang moderasi beragama di PPKP Ribathul Khail akan ditampilkan melalui sudut pandang kearifan sosiokulturalnya bersama masyarakat adat Kutai Kraton di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Peranan kearifan sosiokulturalnya dalam menyemai nilai-nilai moderasi beragama menjadi tilikan penting dalam kajian ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif untuk menjelaskan secara deskriptif obyek yang tengah dikaji.¹⁴ Penerapan metode kualitatif dimulai dengan adanya asumsi, adanya suatu pandangan dunia (*a world view*), atau adanya kemungkinan untuk menggunakan lensa teoritis guna menyelidiki makna individu atau kelompok yang dikaitkan dengan masalah sosial atau manusia.¹⁵ Digunakannya pendekatan Antropologi Sosial Agama dalam penelitiannya ini karena berkaitan dengan tiga hal penting dalam kajian ini, yaitu: *Pertama*, sebagai alat metodologis untuk memahami corak keagamaan masyarakat; *Kedua*, sebagai pendekatan kebudayaan yang berguna untuk mengarahkan dan menambah keyakinan keagamaan yang dipunyai oleh masyarakat sesuai ajaran yang benar tanpa menimbulkan gejala pertentangan; dan, *Ketiga*, mengantarkan pemeluk agama menjadi lebih toleran dalam perbedaan lokal.¹⁶ Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*)

¹³Anonim, "Asal Mula Érau," Portal, *KutaiKartanegara.com*, diakses 20 Juni 2022, http://Érau.kutaikartanegara.com/index.php?menu=Asal_Mula_Érau.

¹⁴Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), p. 58.

¹⁵John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2nd ed. (California: Sage Publication, Inc., 2007), p. 37.

¹⁶Masdar Hilmy dan Akh. Muzakki, *Dinamika Baru Studi Islam*, Cet. 1 (Surabaya: Arkola, 2005), p. 165-166.

yang dilakukan tatap muka (*face to face*) dengan informan, berupa pertanyaan-pertanyaan secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*openended*), yang dirancang guna memunculkan pandangan-pandangan dan opini informan.¹⁷ Informan utama dalam penelitian ini adalah pimpinan PPKP Ribathul Khail Tenggara. Sementara, analisis penelitian menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data guna pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data, yang dimaksudkan untuk memeriksa dan melihat kesesuaian data yang diperoleh dengan kegiatan sebenarnya. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang sekaligus menjadi cara pengumpulan data.¹⁸

Pembahasan

1. Tinjauan Filosofis tentang Beragama dalam Realitas Sosial

Realitas berkaitan dengan pengetahuan (*knowledge*), di mana realitas adalah suatu kualitas dalam fenomena-fenomena keberadaan (*being*) manusia namun tidak bergantung dengan kehendak manusia, sedangkan pengetahuan itu berkaitan dengan kepastian bahwa fenomen-fenomena itu nyata adanya dan memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik.¹⁹ Sementara, realitas sosial adalah hasil kreasi masyarakat sebagai suatu aktivitas manusia dalam membangun dunianya yang merupakan aktivitas penataan pengalamannya secara kognitif maupun normatif.²⁰

Manusia beragama dalam realitas sosial dilatarbelakangi pandangannya akan adanya suatu mekanisme dalam kehidupan sosial, yang disebut *nomos*, yang menjadi pedoman bagi manusia dalam mengatur tingkah lakunya sehari-hari, sebab tanpa tatanan yang bermakna terhadap setiap pengalaman tersebut manusia tidak akan dapat bertahan hidup karena akan dirundung kecemasan dan tenggelam dalam dunia yang tanpa makna, kacau, tidak berperasaan, dan gila. *Nomos* berarti menjalani kehidupan yang tertib dan bermakna, dimana keterasingan secara radikal dari dunia sosial

¹⁷John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (Los Angeles: SAGE Publication, Inc., 2009), p. 267.

¹⁸Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, p. 330.

¹⁹Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (London: Penguin Group, 1991), p. 13.

²⁰Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Element of a Sociological Theory of Religion* (New York: Open Road Integrated Media, 2011), p. 9.

merupakan suatu ancaman yang sangat kuat bagi individu. Keterasingan itu akan meruntuhkan tatanan fundamental dimana individu bisa memahami kehidupannya dan mengenali identitasnya. Individu tidak saja kehilangan pedoman moral dengan konsekuensi psikologis yang merugikan, tetapi juga mengaburkan pedoman kognitifnya. Dan bahaya yang paling kuat dari keterasingan itu adalah ketanpamakaan (*meaninglessness*).²¹

Agama merupakan usaha manusia untuk membentuk suatu kosmos yang sakral,²² sehingga sebagai sesuatu yang bersifat adikodrati, agama merupakan entitas yang diwahyukan oleh Allah dari langit, meskipun dalam realitasnya agama merupakan pranata bagi masyarakat yang mengalami proses transformasi seiring perubahan kebudayaan di masyarakat. Kosmos yang sakral itu adalah suatu realitas yang dihadapi oleh manusia, meski bukan berasal dari dirinya namun sangat berkuasa dan tertuju pada dirinya, yang mampu menempatkan manusia dalam tatanan yang bermakna. Kosmos yang sakral itu ditegakkan oleh agama yang bersifat transenden (di luar kekuasaan manusia) dan meliputi manusia. Kosmos yang sakral itu “mencuat” dari rutinitas normal kehidupan sehari-hari namun bersifat luar biasa, meski secara potensial berbahaya namun dapat dikendalikan demi kebutuhan-kebutuhan kehidupan sehari-hari.²³

Sedangkan antonim dari yang sakral itu ialah profan (tidak sakral), yakni dapat dimaknai sebagai rutinitas yang berpeluang diresapi oleh kekuatan yang sakral, misalnya pekerjaan yang dianggap sakral. Kualitas sakral pada peristiwa-peristiwa biasa dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dikuatkan melalui berbagai ritual, yang jika kehilangan sifat itu sama artinya mengalami sekularisasi.²⁴ Antonim yang lebih dalam dari kata sakral ialah *chaos* (kekacauan), sebagai tempat munculnya yang sakral sekaligus menjadikannya sebagai lawan. Oposisi kosmos melawan kekacauan diekspresikan dalam berbagai mitos kosmogonik (asal muasal kejadian benda langit dan alam semesta). Ini berarti bahwa berada dalam hubungan yang benar dengan kosmos yang sakral berarti dilindungi dari ancaman-ancaman kekacauan, sedangkan ke luar dari

²¹*Ibid.*, p. 21-22

²²*Ibid.*, p. 35.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, h. 36.

hubungan yang benar itu berarti tersudut ke tepi jurang ketanpamaknaan (*meaninglessness*), sehingga yang patut diwaspadai oleh orang beragama ialah kekuatan berbahaya yang inheren dalam manifestasi yang sakral, sehingga dikhawatirkan akan kehilangan semua hubungan yang sakral itu.²⁵

2. PPKP Ribathul Khail di Tengah Masyarakat Adat Kutai Kraton

a. Profil PPKP Ribathul Khail

PPKP Ribathul Khail adalah salah satu pesantren tertua di Kota Tenggarong, Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berdiri pada tanggal 1 Mei 1976 (2 Jumadil Awal 1396 H), PPKP Ribathul Khail kemudian diresmikan pada tanggal 4 Agustus 1976 M (2 Sya'ban 1396 H) oleh Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai saat itu Drs. H. Akhmad Dahlan (1928-1986). PPKP Ribathul Khail berdiri karena adanya keinginan yang kuat dari para tokoh Islam yang ada di wilayah Kutai saat itu guna mewujudkan suatu wadah pendidikan agama secara khusus mencetak generasi muslim dan muslimah yang berilmu dan bertaqwa, berakhlak mulia, serta berjiwa Pancasila.

Penamaan Pondok Pesantren “Karya Pembangunan” tidak terlepas dari andil Drs. H. Akhmad Dahlan sebagai Bupati, sekaligus menjadi tokoh pendiri pesantren. Guna memperkuat citra kepesantrenan, Dewan Pendiri Yayasan PPKP Ribathul Khail menambahkan nama “*Ribathul Khail*” yang berarti pasukan perang, yang terambil dari Q.S. Al-Anfal (8) ayat 60, dengan kalimat “*...wa min Ribâth al-Khail Turhibûn bibî ‘aduû Allâh wa ‘aduûakum...*”.

Secara geografis, PPKP Ribathul Khail letaknya sangat menguntungkan karena berada di pusat kota dan jalan protokol yang mudah diakses dari berbagai arah. Pesantren yang beralamat lengkap di Jalan K.H. Akhmad Mukhsin, Nomor 89, R.T. 27, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong ini mempunyai tipe *Boarding Day School*, yaitu sebagian siswa tinggal di asrama dan sebagian lain di luar asrama dengan peraturan dan tata tertib yang ketat dan baik. Semua itu merupakan faktor pendukung keberhasilan proses belajar mengajar. PPKP Ribathul Khail menyelenggarakan pendidikan madrasah jenjang Tsanawiyah dan Aliyah, serta Diniyah.

²⁵*Ibid.*

PPKP Ribathul Khail dikembangkan oleh Yayasan yang telah mengalami sekali pergantian kepemimpinan, yakni H. Abdullah Rapi'i dan H. Iskandar Usat. Sementara kepemimpinan PPKP Ribathul Khail telah melalui tiga generasi, yakni H.M. Sabri Ismail (1976-2006), Drs. H. Aminuddin Edy, M.M. (2006-2021), dan Asmuri, S.Pd. (2021-sekarang). Selama tiga generasi kepemimpinan itu telah banyak upaya pembangunan yang dilakukan, termasuk bangunan megah pesantren yang berdiri di tengah Kota Tenggarong.

PPKP Ribathul Khail adalah pesantren yang mampu meneguhkan kedudukannya dalam bingkai kemajemukan dan toleransi bersama masyarakat adat Kutai Kraton sembari menyemai nilai-nilai keberagaman yang moderat. Adanya penerimaan dari PPKP Ribathul Khail terhadap ekspresi berkepercayaan serta ragam ritual dan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kutai Kraton memberi pemahaman bahwa pesantren ini mampu mengaktualisasi eksistensinya dan hidup berdampingan secara damai dalam sistem sosial budaya masyarakat setempat.

b. Masyarakat Adat Kutai Kraton, Kepercayaan dan Tradisinya

Etnis Kutai Kraton sebagai masyarakat adat tergolong sebagai kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.²⁶ Masyarakat adat Kutai Kraton adalah etnis subkultur dari kalangan bangsawan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Adat masyarakat Kutai Kraton ini adalah tradisi yang melembaga di kalangan bangsawan Kutai Kartanegara ing Martapura, yang kebanyakannya beragama Islam. Upacara adat dan kegiatan keagamaan masyarakat adat Kutai Kraton sangat beragam namun memiliki nuansa Hindu serta Animisme dan Dinamisme, meskipun pada sebagian aspek keagamaannya itu terdapat pula ritual yang bernuansa Islam.²⁷

²⁶Pengertian “masyarakat adat” menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada Pasal 1 Angka 3. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil” (2007).

²⁷Zailani Idris, *Kutai: Obyek Perkembangan Kesenian Tradisional di Kalimantan Timur* (Tenggarong: Bagian Humas Setwilda Tk. II Kutai, 1999), p. 8, 45.

Masyarakat adat Kutai Kraton ini memiliki pandangannya sendiri terhadap dimensi kebudayaan mereka, yang mencakup adat-istiadat, kepercayaan, ritual, hingga hukum di dalam masyarakatnya. Sebagai sebuah komunitas kultural mereka memiliki kepercayaannya sendiri yang lazim disebut sebagai agama primitif, yang tentunya berbeda dari aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau mengidentikkannya dengan enam agama yang diakui oleh pemerintah (Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu). Lazim diketahui di kalangan antropolog, agama primitif dinyatakan sebagai akar dari setiap agama, bahkan dalam konteks evolusi agama istilah “animisme” digunakan untuk menyatakan keyakinan terhadap “ada” spiritual, yang menjadi dasar dari seluruh sistem keagamaan. Herbert Spencer (1820-1903) dan Edward Burnett Tylor (1832-1917) adalah dua di antara sekian banyak antropolog yang berpandangan bahwa agama primitif sebagai dasar dari sistem keagamaan. Spencer dalam *Principles of Sociology* (1876) menyebutkan bahwa penyembahan terhadap leluhur merupakan akar bagi setiap agama, sedangkan Tylor dalam karyanya *Primitive Culture* (1871) menyatakan bahwa animisme sebagai dasar agama dilandasi oleh pemahamannya tentang keyakinan pada jiwa (*soul*) dan keyakinan pada roh (*spirit*), yang mana keduanya dinyatakannya bersifat universal di seluruh budaya manusia.²⁸

Namun demikian, penyebutan agama primitif ini tidak bermaksud mengatakan bahwa keyakinan ini terbelakang, tetapi sesuatu yang sifatnya mendasar dan pokok, yang masih terdapat dan dianut oleh banyak suku-suku bangsa di Indonesia. Meski pada hakikatnya agama primitif itu sama dengan agama-agama tradisi besar lainnya, yang memiliki implikasi sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Bedanya, di dalam agama primitif tidak ada wahyu, tidak ada nabi, dan tidak ada kitab suci, yang ada hanyalah intuisi penerimanya yang disampaikan kepada kerabat, kemudian dilestarikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perbedaan lainnya, jika agama-agama tradisi besar bersifat universal dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat manapun, maka agama primitif cenderung hanya relevan dalam masyarakat tertentu

²⁸Brian Morris, *Antropologi Agama: Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer*, terj. Imam Khoiri, Cet.. 2. (Yogyakarta: AK Group, 2007), p. 117, 120-121.

dengan kebudayaan setempat, dan juga terbatas penganutnya pada kelompok suku bangsa atau kelompok kerabat saja.²⁹

Bagi sebagian antropolog, pandangan tentang agama primitif sebagai asal mula agama-agama universal dianggap meremehkan, baik bagi agama primitif itu sendiri maupun bagi agama-agama dalam tradisi besar lainnya. E.E. Evans-Pritchard (1902-1973) misalnya, mengkritik para sarjana yang mencari dan menemukan dalam agama primitif suatu senjata yang dapat digunakan terhadap agama Kristen dengan akibat fatal. Jika agama primitif saja dapat diterangkan sebagai suatu penyelewengan intelektual, baik sebagai suatu fatamorgana yang ditimbulkan oleh tekanan perasaan, atau oleh fungsi sosialnya, maka akibatnya agama-agama yang lebih tinggi dapat diperkecil artinya dan dirusak dengan cara yang sama. Dikhawatirkan di kemudian hari, konsekuensi sikap ini akan melahirkan peremehan yang paling akut, yaitu peremehan atas segala kesakralan agama-agama universal.³⁰

Adat yang mentradisi dalam masyarakat adat etnis Kutai Kraton diantaranya rangkaian Upacara Adat *Érau* Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura di Tenggarong. Ritual upacara adat *Érau* terdiri dari tujuh rangkaian acara, yaitu: (1) *Menjamu Benua*, yaitu prosesi memanggil, memberitahu, dan memberi sajian atau makanan kepada makhluk kayangan untuk berjaga-jaga dari marabahaya selama pelaksanaan *Érau*; (2) *Merangin*, yaitu tarian adat untuk memohon dan meminta ijin kepada roh halus atau makhluk gaib agar selama melaksanakan *Érau* orang-orang di sekitarnya mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan terhindar dari malapetaka, serta gangguan roh-roh jahat; (3) *Belulub*, yaitu prosesi ritual Dewa dan Belian terhadap Raja/Sultan/Putera Mahkota guna membersihkan diri dari unsur-unsur jahat, baik berwujud maupun tak berwujud; (4) *Mendirikan Ayu*, atau *Sangkob Pintu*, yaitu ritual di Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura dalam suasana kedaton didominasi kain warna kuning, bermakna mendirikan kebenaran yang tersurat maupun tersirat, memiliki kekuatan magis dan memancarkan kekuatan spiritual; (5) *Bepelas*, yaitu memuja sukma dan raga Sultan dari ujung kaki hingga ujung rambut, agar Sultan

²⁹Parsudi Suparlan, “Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Wujud Kebudayaan Spiritual (Makalah Bahasan)” dalam Tim Ditjenbud, *Dialog Budaya Spiritual*, Cet. 1. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2000), p. 26.

³⁰E.E. Evans-Pritchard, *Theories of Primitive Religion* (London: Clarendon Press, Oxford University Press, 1965), p. 15.

mendapat kekuatan dalam melaksanakan tugas maupun adat; (6) *Mengulur Naga*, yaitu mengarak replika *Naga Laki* dan *Naga Bini* dari Keraton di Kecamatan Tenggarong ke Desa Kutai Lama di Kecamatan Anggana, untuk kemudian tubuhnya dilarung ke Sungai Mahakam di Desa Kutai Lama, sementara kepala dan ekor replika naga akan disemayamkan kembali di Keraton; dan, (7) *Belimbur*, yaitu menyucikan diri dari pengaruh jahat, prosesnya diawali oleh Sultan dengan memercikan air *Tuli* (air suci dari perairan Desa Kutai Lama) dengan Mayang Pinang ke tubuhnya dan orang-orang terdekatnya.³¹

Sementara itu, ada pula adat perkawinan, upacara melahirkan, dan upacara kematian. Pada adat perkawinan, misalnya, dikenal istilah *bedatang*, *sorong tanda*, *sumaban*, *bebatam* atau *betemat*. Mengiringi pelaksanaan adat perkawinan itu adalah kesenian *hadrah/rebana* yang berisikan pujian kepada Rasulullah disertai dengan tepuk rebana, gerak tari melambai-lambaikan bendera kecil beraneka warna. Selain itu, malam harinya digelar kembali kesenian *tingkilan*, tarian *jepen*, *beyaer* dan lain sebagainya. Dalam upacara kelahiran dilaksanakan upacara *naik ayun* yang diiringi pembacaan *Diba'* atau *Bejanji* yang menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad dalam Bahasa Arab, serta *tepong tawar* dengan memercikan air kembang. Sedangkan dalam upacara kematian masyarakat Kutai Kraton dilakukan upacara 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari dan 100 hari dengan melakukan pembacaan doa di rumah orang yang mengalami kematian.³²

3. Kearifan Sosiokultural PPKP Ribathul Khail

Konsep kearifan secara mendasar diartikan sebagai kebijaksanaan (*wisdom*)³³ yaitu kemampuan untuk bertindak dengan baik berdasarkan pengalaman, pemahaman, pengetahuan, wawasan dan akal sehat.³⁴ Kearifan ini adalah integrasi aspek-aspek afektif, konatif, dan kognitif dari kemampuan manusia dalam menanggapi tugas-tugas dan permasalahan hidupnya, di mana terdapat keseimbangan yang intens antara derajat pertentangan emosi dan tindakan pribadi, antara melakukan tindakan dan tidak

³¹Anonim, "Rangkaian Upacara Adat Kesultanan Dalam Rangka Pesta Adat Érau" (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017), diakses 20 Juni 2022, www.disbudpar.kutaikartanegarakab.go.id.

³²Idris, *Kutai: Obyek Perkembangan ...*, p. 45, 47, 50

³³John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris (An Indonesian-English Dictionary)*, Cet. 3. (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), p.29.

³⁴Robert Young, "Introduction: Ecological Wisdom as Discourse" dalam Bo Yang dan Robert Fredrick Young, eds., *Ecological Wisdom: Theory and Practice* (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019), p.2.

melakukan tindakan, serta antara pengetahuan dan keragu-raguan.³⁵ Sementara sosiokultural berkenaan dengan kelompok etnokultural, kelas, ataupun struktur organisasi dari peran, posisi, status, dan subkelompok. Sosiokultural berkaitan dengan sifat alami kehidupan sosial yang normatif dalam konteks budaya yang lebih luas, di mana seseorang berhubungan dengan dunianya melalui seperangkat tindakan tertentu yang bermakna.³⁶ Dalam hal ini terdapat sistem sosiokultural (*sociocultural system*) yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tiga jenis fenomena berikut, yaitu: (1) fenomena material, yang berkaitan dengan lingkungan, populasi, dan teknologi yang digunakan, (2) fenomena struktur sosial, yang berkaitan dengan kelompok manusia dan organisasinya, dan (3) fenomena ideasional, yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, ideologi, keyakinan agama, dan aspek simbolik lainnya yang hadir dalam kehidupan masyarakat.³⁷

Kearifan sosiokultural dengan demikian merefleksikan suatu sikap kebijaksanaan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk menanggapi permasalahan hidup yang berkaitan dengan sifat alami kehidupan sosial yang normatif dalam konteks budaya yang lebih luas, yang berkaitan dengan fenomena-fenomena: material (lingkungan, populasi, dan teknologi), struktur sosial (kelompok manusia dan organisasinya), dan ideasional (nilai-nilai, norma-norma, ideologi, keyakinan agama, dan aspek simbolik lainnya) dalam kehidupan masyarakat.

Pesantren memiliki kepercayaan diri dengan ajaran Islam yang dianutnya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, serta mampu berbagi pengetahuan, wawasan, pengalaman, bahkan praktik beragama yang benar, sejauh tidak keluar dari akidah dan norma-norma kebenaran dalam agama Islam. Tuntutan agar PPKP Ribathul Khail mampu berinteraksi dengan nilai-nilai yang hidup di luar pesantren meskipun bertentangan memberikan kesempatan kepada pesantren untuk menggunakan ajaran Islam dalam menghadapi kehidupan nyata.

³⁵James E. Birren dan Cheryl M. Svensson, "Wisdom in History" dalam Robert J. Sternberg dan Jennifer Jordan, eds., *A Handbook of Wisdom: Psychological Perspectives* (New York: Cambridge University Press, 2005), p. 15.

³⁶Alberto Rosa dan Jaan Valsiner, "Editor's Introduction: Sociocultural Psychology on the Move" dalam Alberto Rosa dan Jaan Valsiner, eds., *The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology, Second Edition* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2018), p. 4.

³⁷Frank W. Elwell, *Sociocultural Systems: Principles of Structure and Change* (Canada: AU Press, 2013), p. 13.

Kearifan sosiokultural PPKP Ribathul Khail merefleksikan sikap kebijaksanaan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam kehidupan sosial bersama masyarakat. Kaitan kehidupan sosial itu normatif sifatnya dalam konteks kebudayaan yang luas, mencakup fenomena-fenomena material, struktur sosial dan ideasional. Petikan wawancara dengan pimpinan PPKP Ribathul Khail terkait kearifan sosiokulturalnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pandangan Kearifan Berasal dari Al-Qur'an dan Hadis

Petikan wawancara dengan pimpinan PPKP Ribathul Khail memberi simpulan bahwa kearifan sosiokultural berasal dan dapat digali dari Al-Qur'an dan Hadis. Informan mengatakan:

“Di dalam Islam itu kan diajarkan untuk menghormati orang yang berbeda agama. Apalagi cuma berbeda adat tradisi. Kitab Suci Al-Qur'an maupun Hadis, ada yang membicarakan supaya tidak mengolok-olok orang yang menyembah selain Allah. Ini kan artinya Islam itu sangat bijaksana dan toleransi. Bahkan, ada jua hadisnya, contohnya hadis tentang akikah yang dulunya merupakan adat masyarakat jahiliyah, ketika Islam datang dilakukan penyesuaian dengan syariat Islam.”³⁸

Menurut pernyataan ini, ajaran Islam itu sangat peka terhadap tradisi masyarakat sepanjang bersifat positif. Perlunya suatu kajian mendalam tentang Islam untuk membuktikan bahwa ternyata Islam tidak abai terhadap realitas adat dan tradisi masyarakat di sekitarnya. Informan menyampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menyebut jangan mengolok-olok orang yang menyembah selain Allah karena mereka nanti akan mengolok-olok Allah dengan melampaui batas. Ini menandakan perlunya kebijaksanaan dalam melihat situasi sosial masyarakat di sekitar kita, bahkan Islam menerima adat masyarakat setempat.

Berkaitan dengan pernyataan informan di atas, memang benar terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am (6) ayat 108, yang menyebutkan:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ
إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.

³⁸Wawancara, Ustaz Asmuri, S.Pd., Pimpinan PPKP Ribathul Khail, Tenggarong, 22 Juni 2022.

Ayat inilah nampaknya yang dimaksud di atas dengan istilah “mengolok-olok”, yang dapat berarti pula mengata-ngatai. Sedangkan hadis tentang akikah yang disebut dulunya merupakan adat masyarakat Jahiliyah ada disebutkan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim, dari Abdullah ibn Buraidah.

سنن أبي داود ٢٤٦٠: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَأَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبِحُ شَاةً وَنُحَلِّقُ رَأْسَهُ وَنَأْطِخُهُ بِرِغْفَرَانِ

Artinya: *Sunan Abu Daud 2460: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Tsabit, telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Husain, telah menceritakan kepadaku ayahku telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah, ia berkata: saya mendengar ayahku yaitu Buraidah berkata: “Dahulu kami pada masa jahiliyyah apabila salah seorang diantara kami melahirkan anak laki-lakinya maka ia menyembelih seekor kambing dan melumuri kepalanya dengan darahnya. Kemudian tatkala Allah datang membawa Islam maka kami menyembelih seekor kambing dan mencukur rambutnya serta melumurinya dengan r'afaran.”*

Hadis ini memberi bukti bahwa ajaran Islam itu tidak abai terhadap adat tradisi masyarakat, bahkan untuk adat masyarakat Jahiliyah yang dapat dilakukan penyesuaian di dalamnya agar dapat diterima dalam agama Islam.

b. Pandangan Kearifan Terbentuk melalui Pembinaan Mentalitas Santri dalam Amalan-Amalan Utama (*fadha'il al-a'mal*)

Kearifan sosiokultural di PPKP Ribathul Khail ditopang dengan pembinaan mentalitas santri melalui metode *Mujahadat al-Nafs* (pengendalian diri), *al-Istighatsah* (memohon pertolongan), serta melaksanakan amalan-amalan yang mengiringi ibadah wajib. Informan menyebutkan bahwa:

“Pesantren itu ibarat bengkel yang tugasnya melakukan perbaikan. Wirid, sholat, maupun amalan lainnya harus dijalankan di pesantren sebagai upaya pembinaan mentalitas dan karakter santri. Wirid setelah sholat fardhu dijalankan oleh santri secara konsisten dibimbing oleh guru atau pimpinan pesantren. Pembacaan Surat Yasin, Al-Waqiah, dan Al-Mulk setiap hari dilakukan setelah sholat Maghrib, yang biasanya dilanjutkan dengan bertablil dan pembacaan doa arwah. Wirid Ratib al-Haddad dan Ratib al-Attas juga dikenalkan supaya santri selalu merasa tenang, betah dan nyaman belajar di pesantren. Pembacaan sholat di antaranya maulid Burdah, al-Barzanji, al-Diba'i, dan Shimth al-Dhurar yang dilakukan di pesantren. Terkadang santri bergantian memimpin bacaan sholat dan maulid.”³⁹

³⁹Wawancara dengan Ustaz Asmuri, S.Pd., Pimpinan PPKP Ribathul Khail, Tenggara, 22 Juni 2022.

Berkaitan dengan pernyataan ini, pembinaan mentalitas santri melalui metode *Mujahadat al-Nafs* (pengendalian diri), *al-Istighatsab* (memohon pertolongan), serta melaksanakan amalan-amalan yang mengiringi ibadah wajib menjadi penyokong pandangan kearifan di PPKP Ribathul Khail. Melalui metode *Mujahadat al-Nafs* (pengendalian diri) seorang santri dapat menampilkan perilaku sederhana, proporsional, mampu bersikap, berpikir, dan berperilaku wajar, serta tidak tinggi hati. Melalui metode *al-Istighatsab* (memohon pertolongan) maka seorang santri dapat bersikap arif, berperilaku sabar, rendah hati, patuh kepada ketentuan hukum agama Islam, tidak merugikan orang lain, serta cenderung mampu mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama. Sementara amalan-amalan utama (*fadhwa'il al-a'mal*) yang dilaksanakan oleh santri di pesantren menjadi sudut pandang theosentris bahwa semua kejadian berasal, berproses, dan akan kembali kepada Allah sebagai sumber kebenaran. Semua aktifitas pendidikan di pesantren menjadi bernilai ibadah, yang tentunya dapat berdampak kepada ketenangan lahir batin, sehingga terbitlah sikap sukarela dalam diri dan perilaku santri dalam pengabdian (ibadah) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

c. Pandangan Kearifan Ditopang oleh Pemahaman terhadap Tradisi yang Berkembang di Masyarakat.

Kearifan sosiokultural di PPKP Ribathul Khail dalam konteks masyarakat bersumber dari pemahaman terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat. Informan menyebutkan bahwa:

“Di Kutai Kartanegara tradisi adat itu bercampur baur dengan kepercayaan adat tua. Contohnya adat naik ayun. Bayi yang umurnya sudah sembilan bulan, kemudian dipotong rambutnya, jika perempuan dilobangi daun telinganya. Adat naik ayun ini biasanya dirangkai dengan menasmiyahi anak. Orang tua si anak biasanya mengundang sanak family dan orang-orang kampung, dengan memasukan si bayi ke dalam ayunan yang tersedia. Dibacakan juga Diba' atau Barjanji sambil si bayi diangkat dan diletakkan berulang kali di ayunan. Di ayunan itupun biasanya diletakan buku Yasin atau Al-Qur'an kecil di talinya, dibawahnya diletakkan dalam nampan benda-benda besi berupa gunting, pisau atau sejenisnya. Tidak ketinggalan dilakukan tepong tawar oleh orang-orang tua dari orang tua si bayi, atau sesepuh kampung atau ulama. Tepong tawar sebagai bagian dari upacara naik ayun dilakukan dengan memercikan air kembang kepada si bayi yang dilakukan pada beberapa tempat si bayi, biasanya di ubun-ubun kepalanya, serta kedubabelah tangan dan kakinya.”⁴⁰

⁴⁰Wawancara dengan Ustaz Asmuri, S.Pd., Pimpinan PPKP Ribathul Khail, Tenggarong, 22 Juni 2022.

Berkaitan dengan pernyataan ini, terdapat pandangan bahwa tradisi yang berkembang bersama pranata sosial yang ada, keberlakuannya menjadi wawasan yang patut diketahui dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nilai-nilai adat dalam tradisi yang berkembang di masyarakat dipahami sebagai parameter untuk menilai bahwa tradisi atau adat yang berkembang di masyarakat itu baik sifatnya dan tidak mengakibatkan efek negatif (*madharat*), serta tidak masuk dalam sistem atau teknis ibadah, sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakannya.

Selain itu, Pimpinan PPKP Ribathul Khail juga menginformasikan bahwa santri di PPKP Ribathul Khail dilatih keterampilan kemasyarakatan, wawasan keorganisasian, kepemimpinan, dan kemampuan berbicara di depan umum, sebagaimana terdapat dalam kegiatan OSIS, Pramuka, serta pembinaan minat dan bakat santri melalui *Muhadharah* (pidato/ceramah).⁴¹

4. Hulu Moderasi Beragama di PPKP Ribathul Khail

Moderasi berasal dari bahasa Latin “*moderatio*” berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan), juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* digunakan dalam arti *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Sedangkan dalam bahasa Arab, kata moderasi dikenal dengan *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i’tidâl* (adil), dan *tawâzun* (berimbang).⁴² Konsepsi Islam tentang *wasathiyah* memvisualisasikan derajat keseimbangan tertentu antara konsep dialogis dan yang terkait seperti akal dan wahyu, materi dan jiwa, hak dan kewajiban, individualisme dan sosialisme, paksaan dan kesukarelaan, teks dan *ijtihad*, ideal dan realitas, kontinuitas dan perubahan, dan antara realitas masa lalu dan prospek masa depan, bagaimana *wasathiyah* diwujudkan dan mencapai tujuan keseimbangan dan moderasi yang diinginkan.⁴³

Moderasi dalam konteks umat beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluk, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, serta berbagi

⁴¹Wawancara dengan Ustaz Asmuri, S.Pd., Pimpinan PPKP Ribathul Khail, Tenggara, 22 Juni 2022.

⁴²Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Cet. 1. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), p. 15-16. Lihat juga: Mohammad Hasyim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of Wasathiyah* (New York: Oxford University Press, 2015), p. 9.

⁴³Kamali, *The Middle Path of Moderation ...*, p. 49.

kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama, bukan mengompromikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama demi menyenangkan orang lain yang berbeda paham keagamaannya, atau berbeda agamanya. Adapun moderat dalam kehidupan beragama, berarti sikap yang seimbang antara pengamalan ajaran agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan dalam praktik beragama ini akan menghindarkan dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama, di mana hal ini merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, yaitu kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lainnya.⁴⁴

Pesantren memiliki kepercayaan diri dengan ajaran Islam yang dianutnya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, serta mampu berbagi pengetahuan, wawasan, pengalaman, bahkan praktik beragama yang benar, sejauh tidak keluar dari akidah dan norma-norma kebenaran dalam agama Islam. Hulu moderasi beragama di PPKP Ribathul Khail berkaitan erat dengan pemahaman yang mendalam pimpinan pesantren atas pentingnya kearifan kalangan pesantren terhadap tradisi Masyarakat Adat Kutai Kraton, sehingga sebagai lembaga pendidikan Islam kalangan pesantren dapat mengonstruksi tatanan kehidupan berbangsa, menghargai keanekaragaman budaya dalam formulasi perbedaan agama, bahasa, ras, suku dan lain sebagainya. Sikap kearifan dalam moderasi beragama ini akan menumbuhkan integrasi dan kerjasama yang saling memahami antara PPKP Ribathul Khail dan masyarakat di sekitarnya, terutama Masyarakat Adat Kutai Kraton di Tenggarong. Dalam konteks kemasyarakatan, lembaga pendidikan Islam yang pluralis-multikultural dibutuhkan oleh masyarakat sebagai mediator dalam usaha mencegah hingga menanggulangi potensi konflik etnis dan agama, atau kemunculan benih-benih radikalisme dalam beragama.

Kearifan sosiokultural yang menjadi hulu moderasi beragama di PPKP Ribathul Khail, berdasarkan pernyataan sebelumnya, terdiri atas tiga komponen, yakni: (1) kearifan sosiokultural yang berasal dan digali dari Al-Qur'an dan Hadis, (2) kearifan sosiokultural yang ditopang oleh pembinaan mentalitas melalui metode *Mujahadat al-Nafs* (pengendalian diri), *al-Istighatsab* (memohon pertolongan), serta melaksanakan amalan-amalan yang mengiringi ibadah wajib, dan (3) kearifan sosiokultural yang

⁴⁴Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi ...*, p. 14, 17-18.

bersumber dari pemahaman terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat. Tiga komponen ini dalam moderasi beragama diinterpretasikan oleh penulis akan melahirkan enam dimensi yang terkait antara satu dengan lainnya, yakni:

Pertama, theosentris, yakni pandangan pendidikan di PPKP Ribathul Khail yang menyatakan semua hal berasal, berproses, dan akan kembali kepada kebenaran Tuhan. Semua aktifitas pendidikan dipandang sebagai ibadah kepada Tuhan.

Kedua, kearifan dalam sikap dan perilaku, yakni pandangan PPKP Ribathul Khail tentang sabar, rendah hati, patuh kepada ketentuan hukum agama, tidak merugikan orang lain, serta mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama. Ini semua menjadi titik tekan dalam kehidupan di PPKP Ribathul Khail dalam rangka mewujudkan sifat dan sikap kearifan.

Ketiga, sukarela dalam melaksanakan pengabdian. Di PPKP Ribathul Khail semua kegiatan pendidikan dinilai sebagai ibadah kepada Allah. Penghormatan kepada ustadz dan kyai, para ulama dan berbagai ahli dalam ilmu agama, menjadi kesediaan seorang santri dalam bekerja keras untuk menguasai ilmu pengetahuan agama, hingga kesediaan itu akan mampu mengembangkan lembaga tanpa memedulikan hambatan dan rintangan yang dihadapi. Hal ini menjadi wujud sukarela dalam melaksanakan pengabdian.

Keempat, kesederhanaan sebagai salah satu nilai luhur di PPKP Ribathul Khail menjadi pedoman perilaku bagi semua warga pesantren. Penampilan yang sederhana tidak melulu identik dengan kemiskinan, tetapi kemampuan bersikap dan berpikir wajar, proporsional dan tidak tinggi hati, menjadi gambaran penting perlunya aktualisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam lembaga pendidikan Islam.

Kelima, kolektivitas, yakni nilai kebersamaan yang lebih tinggi daripada nilai individualisme. Kolektivitas di PPKP Ribathul Khail menekankan pentingnya prinsip ini, sehingga setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap orang dapat mendahulukan hak orang lain, akan tetapi dalam hal kewajiban, seseorang harus mampu menunaikan kewajiban dirinya terlebih dahulu sebelum orang lain.

Keenam, mengatur kegiatan bersama. Merujuk pada nilai-nilai yang berkembang di PPKP Ribathul Khail maka kehidupan pesantren di bawah bimbingan ustadz dan kyai mengatur hampir semua kegiatan di lingkungan pesantren. Kepatuhan para santri untuk mengikuti nilai-nilai yang berkembang di PPKP Ribathul Khail dinyatakan

sebagai perbuatan yang menghargai dan patuh, sedangkan keengganan dalam mengikutinya akan terancam dengan kemungkinan memperoleh “kualat” atau balasan fisik maupun psikis yang tidak dikehendaki.

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa dalam PPKP Ribathul Khail, kearifan sosiokultural tercermin sebagai sikap bijaksana yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sosial bersama masyarakat. Kehidupan sosial ini memiliki sifat normatif dalam konteks kebudayaan yang luas, mencakup berbagai fenomena material, struktur sosial, dan ide-ide. Kearifan sosiokultural pesantren ini didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, dan menunjukkan bahwa ajaran Islam menerima dan menyesuaikan diri dengan adat tradisi masyarakat. PPKP Ribathul Khail menguatkan kearifan sosiokulturalnya melalui pembinaan mentalitas santri dengan metode pengendalian diri, memohon pertolongan, dan pelaksanaan amalan-amalan yang mendampingi ibadah wajib. Kearifan ini juga berakar dari pemahaman terhadap tradisi masyarakat, di mana tradisi yang baik dan tidak menimbulkan dampak negatif diakui dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nilai-nilai adat dalam tradisi masyarakat dianggap sebagai parameter untuk menilai kebaikan tradisi atau adat yang tidak bertentangan dengan sistem peribadahan umat Islam.

Daftar Pustaka

- Akbar, Isnaini Nuruddin. “Normalization of Gender Bias Regulations in Pondok Pesantren: Normalisasi Regulasi Bias Gender di Pondok Pesantren.” *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 23, no. 1 (t.t.): 109–26.
- Anonim. “Asal Mula Erau.” Portal Daerah. *KutaiKartanegara.com*. Diakses 27 Juni 2021. http://erau.kutaikartanegara.com/index.php?menu=Asal_Mula_Erau.
- . “Rangkaian Upacara Adat Kesultanan Dalam Rangka Pesta Adat Erau.” Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017. www.disbudpar.kutaikartanegarakab.go.id.
- Berger, Peter L. *The Sacred Canopy: Element of a Sociological Theory of Religion*. New York: Open Road Integrated Media, 2011.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. London: Penguin Group, 1991.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 2nd ed. California: SAGE Publication, Inc., 2007.
- . *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publication, Inc., 2009.

- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Dinana, Aqimi, dan Subiyantoro Subiyantoro. "Peran Pengasuh dalam Manajemen Perubahan pada Lingkungan Organisasi Pondok Pesantren Tegalsari di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pendidikan* 9, no. 2 (2021): 56–66.
- Echols, John M., dan Hasan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris (An Indonesian-English Dictionary)*. Cet. 3. Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Elwell, Frank W. *Sociocultural Systems: Principles of Structure and Change*. Canada: AU Press, 2013.
- Evans-Pritchard, E.E. *Theories of Primitive Religion*. London: Clarendon Press, Oxford University Press, 1965.
- Hilmy, Masdar, dan Akh. Muzakki. *Dinamika Baru Studi Islam*. Cet. 1. Surabaya: Arkola, 2005.
- Idris, Zailani. *Kutai: Obyek Perkembangan Kesenian Tradisional di Kalimantan Timur*. Tenggarong: Bagian Humas Setwilda Tk. II Kutai, 1999.
- Kamali, Mohammad Hasyim. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasat'iyyah*. New York: Oxford University Press, 2015.
- Karim, Hamdi Abdul. "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatan lil 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam." *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, No. 01, Vol. 4 (2019): 1–20.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (2019).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (2007).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 13. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Morris, Brian. *Antropologi Agama: Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Imam Khoiri. Cet. 2. Yogyakarta: AK Group, 2007.
- Mulyana, Cahya. "UU Pesantren Akomodasi Usulan Ormas." *Media Indonesia*, 25 September 2019. <https://mediaindonesia.com/read/detail/261558-uu-pesantren-akomodasi-usulan-ormas>.
- Niam, Ahmad Mukafi. "Pesantren, Hulu Moderasi Berislam di Indonesia." *NU Online*, 18 Oktober 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/123958/pesantren--hulu-moderasi-berislam-di-indonesia>.
- Nisa, Akramun. "PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA DAKWAH PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA." *Ash-Shababab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 7, no. 1 (2021): 31–42.
- Rembangy, Musthofa. *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan Di Tengah Arus Globalisasi*. Cet. 2. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Rosa, Alberto, dan Jaan Valsiner, ed. *The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology, Second Edition*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2018.
- Sholeh, Badrus, ed. *Budaya Damai Komunitas Pesantren*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.
- Sternberg, Robert J., dan Jennifer Jordan, ed. *A Handbook of Wisdom: Psychological Perspectives*. New York: Cambridge University Press, 2005.

- Suharto, Toto. "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia." *At-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, No. 01, Vol. 17 (2017): 155–78.
- Sutrisno, Edy. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam*, No. 1, Vol. 12 (2019): 324–48.
- Tim Ditjenbud. *Dialog Budaya Spiritual*. Cet. 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Cet. 1. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Yang, Bo, dan Robert Fredrick Young, ed. *Ecological Wisdom: Theory and Practice*. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019.